

**MANAJEMEN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA (STUDI PADA IMPLEMENTASI OLEH  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR)**

Septyarini Dwi Praminingtyas  
S1 Administrasi Publik, FIS, UNESA ([septyseptyarini@gmail.com](mailto:septyseptyarini@gmail.com))

Prasetyo Isbandono, S. Sos., M. Si

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, mulai dari pengedar, pecandu hingga produsen besar. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu yang memiliki tingkat penyalahgunaan tertinggi di Indonesia diantara provinsi lainnya. Maka, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur melaksanakan strategi yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional dalam Inpres No. 12 Tahun 2011. Untuk itu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam pencegahan dan peredaran penyalahgunaan narkoba.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara yang penentuan respondennya menggunakan teknik *purposive sampling*, observasi, dan dokumentasi. Sampel di diambil dari orang-orang yang terkait implementasi strategi dari dalam Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur ataupun diluar instansi yang dapat membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah. Fokus penelitian menggunakan teori implementasi strategi oleh Wheelen dan Hunger meliputi 3 hal dalam implementasi strategi yaitu aktor pelaksana strategi, pelaksanaan strategi, dan pengorganisasian sumber daya manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur melaksanakan strateginya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui dari data hasil lapangan yang menyatakan bahwa aktor pelaksana strategi, pelaksanaan strategi, dan pengorganisasian sumber daya manusia sebagian besar telah dipenuhi dalam pelaksanaan strategi. Aktor pelaksana internal dan eksternal yang telah bekerja sama dengan baik sehingga menciptakan sinergi yang baik dalam implementasi strategi, pelaksanaan strategi yang sudah terlaksana dengan cukup baik meskipun terdapat kendala di dalamnya yaitu terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan strategi dan pemahaman masyarakat terkait materi yang disampaikan karena perbedaan suku, agama, kultur, dan strata pendidikan serta belum adanya SOP pada Tahun 2015. Kemudian dapat dilihat dari pengorganisasian Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur yang dirasa sudah diatur sedemikian rupa dengan cukup baik, namun tetap memiliki kendala seperti kurangnya sumber daya manusia.

Kata Kunci : Manajemen Strategi, Badan Narkotika, Pencegahan

# MANAGEMENT STRATEGY FOR PREVENTION AND ERADICATION DRUG ABUSE (STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL BOARD OF NARCOTICS EAST JAVA)

Septyarini Dwi Praminingtyas  
S1 Public Administration, FIS, UNESA ([septyseptyarini@gmail.com](mailto:septyseptyarini@gmail.com))

Prasetyo Isbandono, S. Sos., M. Si

## ABSTRACT

Indonesian drug abuse in recent years have shown a significant increase, ranging from dealers, addicts to major manufacturers. East Java province into one that has the highest rate of abuse cases in Indonesia among other provinces. Thus, The National Board Of Narcotics East Java to implement the strategy set by the National Narcotics Agency in Instruction No. 12 Year 2011. For the purpose of this research is to find out and describe the implementation strategies of the The National Board Of Narcotics East Java in the prevention of drug abuse and trafficking. For the purpose of this research is to find out and describe the implementation strategies of The National Board Of Narcotics East Java in the prevention of drug abuse and trafficking.

This type of research used in this research is descriptive using a qualitative approach. While data collection techniques performed through determination interview respondents using purposive sampling techniques, observation, and documentation. Samples taken from people regarding the implementation of the strategy of The National Board Of Narcotics East Java and outside agencies that can assist researchers in answer the problem formulation. The focus of research using the theory of strategy implementation by Wheelen and Hunger includes 3 strategy implementation process in which the actors implementing the strategy, execution of strategy, and human resource management.

The results showed that the The National Board Of Narcotics East Java implement its strategy in the prevention and eradication of drug abuse has been implemented properly. It can be known from the data of the field that states that the actor implementing the strategy, execution of strategy, and organization of human resources have largely been met in the implementation of the strategy. Implementing internal and external actors that have worked well together so as to create a good synergy in the implementation of the strategy, implementation of strategies that have been implemented quite well despite the obstacles in it is a limited budget for the implementation of the strategy and the associated public understanding of the material presented due to differences in ethnicity, religion, culture, and education strata and the lack of SOP in the year 2015. Then it can be seen from the organization of The National Board Of Narcotics East Java which is considered already arranged quite well, but still has obstacles such as lack of human resources.

Keywords: Strategic Management, National Narcotics Agency, Prevention.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia tidak lagi menjadi negara transit tetapi sudah menjadi pasar narkoba yang besar, apalagi dengan harga yang tinggi (*"great market, great price"*) sehingga Indonesia semakin rawan menjadi surga bagi para sindikat narkoba (Rencana Aksi Badan Narkotika Nasional). Kemudian ditambah lagi dengan adanya kenyataan bahwa Indonesia berada pada posisi kesembilan oleh UNODC pada tahun 2009 dimana konsumsi ganja terbesar sekitar 110 metrik ton atau sekitar 2% total konsumsi dunia yang mencapai 6.002 metrik ton. Indonesia juga menjadi negara dengan negara peringkat 10 tertinggi di dunia sebagai ladang bagi peredaran narkoba jenis ekstasi dan ganja (<http://granat.or.id/>, 5 Agustus 2012).

Ironisnya, pemakai atau pengguna narkoba lebih banyak berasal dari pemuda, calon penerus perjuangan bangsa. Prevalensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar se-Indonesia mencapai 4,7 persen dari data *survey* yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (<http://news.detik.com>, 23 Mei 2013). Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2010 oleh Badan Narkotika

Nasional bekerja sama dengan Universitas Indonesia, prevalensi penyalahgunaan narkoba penduduk Indonesia sebesar 2,21 % dan apabila tidak dilakukan upaya-upaya yang maksimal dan terpadu dalam penanganannya, maka pada tahun 2015 diproyeksikan akan naik menjadi 2,8 % atau sekitar 5,1 juta sampai dengan 5,6 juta jiwa. (<http://beritajatim.com>, 26 Agustus 2014)

Pernyataan tersebut diperkuat dengan tabel dibawah ini yang diperoleh dari Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang melampirkan jumlah tersangka kasus narkoba berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2013, sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Tahun 2013**

NO.	PROVINSI	TAHUN 2012	
		TERSANGKA NARKOBA	
		JUMLAH	RANGKING
1.	Jawa Timur	8.142	I
2.	DKI Jakarta	6.526	II
3.	Sumatera Utara	3.277	III
4.	Jawa Barat	1.719	IV
5.	Kalimantan Selatan	1.616	V

Sumber: Jurnal Data Pencegahan, dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2013

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa jumlah tersangka kasus narkoba berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2013, pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas memiliki kasus tertinggi dengan jumlah 22.952 orang. Diikuti oleh tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah 12.169 orang, kemudian Sekolah Dasar dengan jumlah 7.540 orang dan Perguruan Tinggi dengan jumlah 1.106. Pemuda-pemudi Indonesia yang diharapkan mampu menjadi generasi penerus bangsa untuk merubah Indonesia semakin lebih baik, malah menjadi sorotan utama dari kasus penyalahgunaan narkoba.

Badan Narkotika Nasional sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi, meliputi 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 2) mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 3) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Data yang dilansir oleh Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2011 (Kerugian Sosial dan Ekonomi) Provinsi Jawa Timur tetap sebagai provinsi yang memiliki tingkat kerugian ekonomi tertinggi mencapai 9,5 trilyun. Realita tersebut didukung oleh data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dimana pada tahun 2012 Jawa Timur menempati ranking pertama dalam kasus tersangka narkoba, yaitu:

**Tabel 1.2**  
**Prevalensi Tersangka Narkoba dan Narkotika**  
**Tahun 2012**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH TERSANGKA
1	SD	7.540
2	SMP	12.169
3	SMA	22.952
4	PT	1.106
	<b>JUMLAH</b>	<b>43.767</b>

Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan permasalahan yang dipikul oleh Jawa Timur, maka Badan Narkotika Nasional Provinsi dengan mengsungkan visinya “Menjadi perwakilan Badan Narkotika Nasional di Provinsi Jawa Timur yang mampu melayani seluruh masyarakat Jawa Timur, komponen masyarakat Jawa Timur dan Instansi pemerintah dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Provinsi Jawa Timur”. Provinsi Jawa Timur ingin terus berusaha untuk melaksanakan tindakan tegas bagi penyalahguna narkoba di lingkungan Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini ingin mengambil yang spesifik mengenai implemntasi strategi yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dianalisis dengan menggunakan teori manajemen strategi yang difokuskan hanya pada implementasi strategi. Teori yang digunakan untuk menggambarkan akan digunakan teori menurut Wheelen dan Hunger dimana memiliki 3 hal yang harus diperhatikan dalam sebuah implementasi strategi, meliputi 1) Aktor pelaksana strategi, 2) Pelaksanaan Strategi, dan 3) Pengorganisasian sumber daya manusia. Ketiga indikator tersebut dijadikan landasan teori untuk menggambarkan implementasi strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Sehubungan dengan yang telah dijelaskan, maka penelitian ini berjudul “Bagaimana Manajemen Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (Studi pada Implementasi Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur)”.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **A. Manajemen Strategi**

Manajemen strategi merupakan sekumpulan keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai sasaran organisasi. Dengan demikian manajemen strategis melibatkan pengambilan keputusan berjangka panjang dan rumit serta berorientasi ke masa depan. (Suyanto, 2007:10). Hunger & Wheelen (2003:3) pun serupa dengan menyatakan manajemen strategis ialah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang

menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategis, implementasi dan evaluasi. Manajemen strategis sebagai suatu bidang ilmu yang menggabungkan kebijakan bisnis dengan lingkungan. Viljoen (dalam Heene dkk, 2010:76) mengutarakan sebuah penafsiran yang rinci dengan mengasumsikan,

“manajemen stratejik adalah proses pengidentifikasian, pemilihan, dan pengimplementasian aktivitas-aktivitas yang dapat memperbaiki kinerja jangka panjang dari organisasi, melalui penentuan arah disertai melanjutkan komitmen ataupun penyesuaian antara ketrampilan internal dengan sarana-sarana dari organisasi berikut pula dengan lingkungan yang berubah evolutif dimana organisasi itu beroperasi.”

### 1. Proses-Proses Manajemen Strategis

Manajemen strategi memiliki langkah atau tahapan yang harus dilalui agar perencanaan untuk mewujudkan strategi dalam pencapaian tujuan dapat terpenuhi dan dilaksanakan. Suyanto (2007:10) menyebutkan bahwa proses manajemen strategis memiliki delapan langkah, antara lain: (1) mendefinisikan visi misi, dan tanggung jawab sosial; (2) menganalisis faktor internal; (3) menganalisis faktor eksternal; (4) memilih tujuan dan sasaran; (5) mengembangkan strategis bisnis; (6) merinci rencana program; (7) implementasi strategi; (8) pengendalian strategi.

Di sisi lain, Hunger dan Wheelen (2003:9), konsep dasar proses manajemen strategis meliputi empat elemen dasar yaitu : (1) pengamatan lingkungan; (2) perumusan strategi; (3) implementasi strategi; (4) evaluasi dan pengendalian. Pada elemen pertama merupakan faktor-faktor penting untuk masa depan organisasi, pengamatan lingkungan menggunakan metode SWOT dimana organisasi mengamati lingkungan internal dan eksternal dari segi *Strengths* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Kesempatan), *Threats* (Tantangan). Formulasi strategi terdiri dari pernyataan misi, tujuan, strategi dan kebijakan kemudian organisasi mengimplementasikan kebijakan. Terakhir, evaluasi strategi dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil dan umpan balik yang didapatkan oleh organisasi.

**Gambar 2.1**  
**Proses Manajemen Strategis Menurut**  
**Wheelen dan Hunger**



Sumber: Wheelen, Thomas dan Hunger, David. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: ANDI

## B. Implementasi Strategi

Dalam penelitian ini lebih mengarahkan pada model atau kerangka manajemen strategi yang berfokus pada tahap implementasi strateginya karena penelitian ini lebih melihat bagaimana implementasi strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan sesuai dengan rumusan masalah.

Implementasi strategi merupakan salah satu tahap dan fase yang penting bagi sebuah strategi. Tahapan ini bukanlah tahapan yang mudah, karena akan ada banyak halangan, rintangan, permasalahan, intervensi dari dalam ataupun luar, yang akan menghampiri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Hariadi (2005:13) implementasi dianggap tahap yang paling sulit mengingat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan di lapangan dan mungkin tidak sesuai dengan perkiraan awal. Hariadi pun menerjemahkan implementasi strategi adalah proses di mana strategi dan kebijaksanaan dijalankan melalui pembangunan struktur, pengembangan program, budget dan prosedur pelaksanaan.

### 1. Proses Implementasi Strategi

Dirgantoro (2004:14) menyebutkan dalam bukunya manajemen stratejik proses-proses manajemen di mana pada tahap implementasi strategi ia mengemukakan beberapa aktivitas atau cakupan kegiatan yang mendapat penekanan antara lain:

- Menetapkan tujuan tahunan
- Menetapkan kebijakan (*policy*)
- Memotivasi karyawan
- Mengembangkan budaya pendukung
- Menetapkan struktur organisasi yang efektif
- Menyiapkan target
- Mendayagunakan sistem informasi
- Menghubungkan kompensasi karyawan dengan *performance* organisasi

Jika Dirgantoro menyebutkan 8 kegiatan pelaksanaan strategi, maka pendapat yang berbeda dipaparkan oleh Wheelen & Hunger (2003:297-335), untuk melihat proses implementasi, perlu dilihat dari 3 hal, yaitu:

#### a) Aktor Pelaksana Strategi

Aktor strategi tak hanya yang ada dalam organisasi akan tetapi juga yang berkontribusi dan berperan aktif terhadap pelaksanaan strategi. meski terkadang pada perusahaan besar, pelaksana strategi ialah setiap orang yang ada dalam organisasi saja. Setiap orang di organisasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan strategi, namun kenyataannya seringkali jumlah pihak yang merumuskan

implementasi lebih sedikit dibanding dengan pelaksana implementasi. Pelaksana strategi melaksanakan berdasarkan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Peran manajer operasional dalam mengawasi pegawai diperlukan tentang pelaksanaan strategi yang dijalankan oleh setiap orang dalam struktur organisasi.

## **b) Pelaksanaan Strategi**

Pada pelaksanaan strategi terdapat pengembangan program yang dibuat dengan tujuan agar strategi yang telah dibuat dapat diimplementasikan dalam suatu “tindakan” (*action-oriented*). Pengembangan program pun bertujuan untuk menjadikan organisasi bergerak mencapai tujuan lebih baik lagi sebelumnya. Pengembangan program harus didukung oleh anggaran.

Anggaran dapat sebagai pengecekan terakhir terhadap kelayakan strategi yang dipilih. Prosedur dibentuk setelah program direncanakan, hal ini bertujuan untuk memperjelas tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing orang dalam organisasi.

### **1) Program**

Pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal perusahaan atau awal dari suatu usaha penelitian baru.

### **2) Anggaran**

Program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan dalam tindakan, tetapi juga menentukan dengan laporan keuangan performa yang menunjukkan pengaruh yang diharapkan dari kondisi keuangan.

### **3) Prosedur**

Prosedur atau yang biasa disebut *Standard Operating Prosedur* adalah sistem langkah-langkah atau teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas diselesaikan.

## **c) Pengelolaan Sumber Daya Manusia**

### **1) Pengorganisasian**

Pengorganisasian berkaitan dengan bagaimana sebuah organisasi menata dan mengelola organisasinya dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi.

Penetapan struktur organisasi adalah hal utama dalam mengorganisasi berbagai aktivitas dan sumber daya manusia yang tersedia dalam sebuah organisasi besar agar semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Struktur organisasional harus sesuai dengan lingkungan organisasi yang cenderung terus berubah dan berkembang, kemudian dapat mempengaruhi struktur strategi.

### **2) Penataan Staff (Staffing)**

Beberapa perubahan tertentu mungkin berimplikasi pada dibutuhkannya orang-orang baru dengan kompetensi baru, memperhentikan orang-orang yang kompetensinya tidak sesuai atau tidak memenuhi standar, melatih kembali karyawan yang ada dan sebagainya. Dalam pembahasan struktur organisasi kita mengenal istilah “*structure follow strategy*”, maka dalam penataan staf ini juga demikian, dalam arti penataan staf mengikuti strategi. Penataan staf dapat terkait dengan pengurangan atau penambahan pegawai, mutasi atau pemberhentian pegawai, kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai untuk peningkatan skill dan kompetensi yang dimiliki, ketrampilan dan keahlian yang berguna bagi pelaksanaan strategi.

### **3) Pengarahan**

Implementasi juga terkait dengan pengarahan staf untuk menggunakan kompetensinya pada tingkat yang paling optimal untuk mencapai sasaran perusahaan.

Tanpa adanya pengarahan, staf cenderung melakukan pekerjaan sesuai dengan cara pandang mereka masing-masing. Pengarahan dapat berbentuk kepemimpinan dari pihak manajemen, mengkomunikasikan norma perilaku dari budaya perusahaan, atau membangun kesepakatan diantara para pegawai untuk melaksanakan strategi menjadi sebuah tindakan nyata.

## 2. Indikator Keberhasilan Implementasi Strategi

Sedari awal proses implementasi ialah suatu strategi yang harus kontekstual memiliki makna antara lain, Beaudan (dalam Heene, dkk, 2010:182):

- a) Sampai sejauh mana nilai-nilai para partisipan secara individual terkait dengan strategi yang akan diimplementasikan;
- b) Sampai sejauh mana strategi tersebut terkait dengan norma-norma kultural yang berpengaruh pada organisasi
- c) Langkah-langkah apa yang perlu diambil agar strategi yang akan diimplementasikan dapat searah dengan persepsi kultural yang berpengaruh pada organisasi.

Hal ini didukung dengan pernyataan dari Galbraith dan Kazanjian dalam Wheelen dan Hunger (1989:245) menyatakan,

*“now, more than ever before, they realize that the successful implementation of a strategy depends on having the right organization structure, resource allocation, compensation program, inform system, and corporate culture”*, sekarang, lebih dari sebelumnya, mereka menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan strategi tergantung pada struktur organisasi, alokasi sumber daya, kompensasi program, sistem informasi dan budaya organisasi.

## III. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun fokus penelitian ini menggunakan teori Wheelen dan Hunger yang berisikan tentang proses implementasi strategi antara lain aktor pelaksana strategi, pelaksanaan strategi dan pengelolaan sumber daya manusia. Setiap proses memiliki indikator didalamnya yaitu aktor pelaksana strategi dilihat dari pelaksana yang berasal dari internal maupun eksternal Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan strategi. Proses kedua ialah pelaksanaan strategi dapat dilihat pada program yang ada di dalam sebuah organisasi guna melaksanakan strategi untuk pencapaian tujuan, anggaran yang mendukung pelaksanaan tersebut dengan menganggarkan keperluan dan kebutuhan organisasi serta prosedur yang turut mendukung sebuah program dapat dilaksanakan oleh organisasi dengan tepat.

Selanjutnya pengelolaan sumber daya manusia terdapat tiga indikator yaitu pengorganisasian dimana hal ini dapat dilihat pada struktur organisasi yang diusung oleh BNNP Jawa Timur untuk mendukung pelaksanaan strateginya dengan membagi tugas, pokok dan fungsi masing-masing pegawai. Staffing ialah indikator kedua, dilihat

bagaimana penempatan pegawai dengan kemampuan yang dimiliki pada posisi yang tepat sehingga pelaksanaan strategi dapat efektif. Indikator terakhir ialah pengarahannya yang dilihat bagaimana tipe komunikasi untuk memberikan pengarahannya baik *up-down*, *bottom-up* atau bahkan ke luar organisasi terkait strategi.

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti ialah Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Pada bentuk penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian guna mendapatkan informasi ialah menggunakan *Purposive sample* yang dipaparkan oleh Arikunto (2010:183) ialah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas random, strata, namun tetap berdasarkan atas tujuan tertentu. Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini terdapat dua sumber diantaranya sumber data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, dan sumber data sekunder yang berasal dari studi pustaka, jurnal-jurnal online, skripsi, dan *website* resmi Badan Narkotika Nasional.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ialah menggunakan tiga teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis data pada penelitian ini menggunakan bentuk analisis data yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:247) meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum

Pada perkembangannya, penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dari waktu ke waktu sehingga Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dianggap tidak sesuai dengan situasi dan kondisi jaman, maka Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk. Pada undang-undang ini, perubahan pada struktur Badan Narkotika Nasional pun dijelaskan. Sebelumnya, pada Perpres No. 83 Tahun 2007 berisi mengenai terpisahnya struktur antara Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan dalam mencegah dan memberantas tidak ada koordinasi terpusat. Kemudian, dibentuklah Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang mempertegas tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional serta struktur vertikal dibawahnya yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Badan Narkotika Nasional sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi, meliputi 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; 2) mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 3) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Badan Narkotika Nasional mendapatkan wewenang dari tugas dan fungsi yang telah dijabarkan seperti diatas, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Narkotika Nasional dibagi menjadi 4 (empat) deputi bidang yaitu Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pemberantasan dan Bidang Rehabilitasi. Kemudian, terkait pada status kelembagaan Badan Narkotika Nasional menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke provinsi dan kabupaten/kota. Di provinsi dibentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Visi dari Badan Narkotika Nasional dalam penanganan narkoba adalah “Terwujudnya Masyarakat Indonesia Bebas Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika Dan Bahan Adiktif Lainnya (Narkoba) Tahun 2015”.

## B. Pembahasan

Wheelen dan Hunger (2003:9), menyatakan manajemen strategis ialah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategis, implementasi dan evaluasi (Wheelen dan Hunger, 2003:297-335). Pada penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan kepada implementasi strataegi dimana pda tahap ini merupakan tahap yang penting untuk diperhatikan, dikarenakan sebuah rencana tak akanmendapat sebuah hasil jika tanpa implementasi.Implementasi strategi dalam hal ini berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan masyarakat yang dimana permasalahan tersebut sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Penelitian yang menggambarkan bagaimana implementasi strategi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur ini, menggunakan tiga variabel berdasarkan Wheelen dan Hunger. Ketiga variabel tersebut akan dijabarkan secara berurutan dan lebih mendalam, sebagaimana dianalisis berasal dari data dan informasi yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur guna menjawab fokus penelitian ini. Berikut ini merupakan pemaparan dari analisis Impelementasi Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba, menggunakan tiga variabel dalam

proses implementasi strategi menurut Wheleen dan Hunger.

## 1. Aktor pelaksana strategi

### a. Aktor pelaksana internal

Aktor pelaksana internal dalam melaksanakan strategi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur yaitu staf yang berada di dalamnya. Aktor internal dalam setiap bidang, Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Pemberantasan mempunyai peran masing-masing dalam melaksanakan strategi. perbedaan peran yang dimiliki oleh setiap bidang deisebabkan tugas dan fungsi yang diemban pun berbeda.

Bidang pencegahan memiliki peran preventif dimana preventif ini mencegah masyarakat sehat, masyarakat yang imun tidak akan menjadi pengguna atau bahkan pengedar. Bidang ini mengenalkan tentang seluk beluk narkoba agar mengetahui bahaya yang terkandung di dalamnya jika disalahgunakan. Bidang ini sekaligus mengajak masyarakat, yang berasal dari lingkungan pekerja negeri atau swasta, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat sekitar pada wilayah Provinsi Jawa Timur. Adapun, bidang pencegahan membentuk kader, kawan BNN untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan strategi agar informasi terkait penyalahgunaan narkoba lebih meluas dan efektif.

Bidang pemberdayaan tak jauh berbeda dengan bidang pencegahan. Bidang inipun melakukan pencegahan pada lingkungan pendidikan dan pekerja, serta lingkungan masyarakat. Pembentukan satgas dan menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat dilakukan untuk menyebarkan pengetahuan bagi masyarakat sekitar terhadap narkoba, kemudian peran bidang ini dalam melaksanakan *test urine* yang bertujuan agar setiap orang lebih awas terhadap narkoba sehingga diketahui apakah ada yang menggunakan narkoba. Pemberian rekomendasi kepada pecandu menjadi tugas yang diemban pula oleh bidang ini. Rekomendasi ini dilakukan oleh BNNP Jawa Timur agar pecandu melakukan rehabilitasi, dengan tanpa biaya.

Pada bidang lainnya yaitu Bidang Pemberantasan, dimana bidang ini melakukan tindakan represif dimana menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum, mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Peran bidang ini berurusan dengan kasus narkoba secara langsung dengan melakukan pengintaian,

penangkapan tersangka peredaran ataupun penyalahgunaan dan pemusnahan barang bukti.

#### **b. Aktor pelaksana eksternal**

Aktor eksternal yang pasti ialah yang ada pada Inpres No. 12 Tahun 2011 yang harus diharapkan bekerja sama untuk melaksanakan strategi nasional. Aktor-aktor dalam lingkup provinsi diemban oleh gubernur beserta jajaran, bupati beserta jajaran, dan walikota beserta jajaran.

Aktor lainnya pada Bidang Pencegahan ialah Kader Anti Narkoba, simpatisan, media, Lembaga Swadaya Masyarakat, sekolah, dan Kawan BNN (Sukarelawan Anti Narkoba BNN yang terdiri dari komunitas-komunitas). Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat aktor berasal dari LSM dan satgas yang dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Aktor eksternal membantu bidang ini dalam melakukan penyuluhan, membantu untuk kegiatan *aftercare*, dan rawat jalan bagi pecandu narkoba seperti yang dilakukan oleh LSM Yayasan Orbit.

Aktor-aktor tersebut melakukan perannya dengan melakukan sosialisasi dalam lingkup dimana mereka berada, misalnya Komunitas Kita yang berasal dari Universitas Negeri Surabaya yang melakukan perannya di lingkungan pendidikan yaitu kampus. Semua aktor eksternal yang terlibat sama-sama menyebarkan informasi dengan cara mereka sendiri, namun tetap dalam pengawasan dan koordinasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Mereka sebagai perpanjangan tangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur untuk mensosialisasikan bahaya narkoba agar masyarakat lebih peka dan sensitif terhadap barang haram tersebut.

Adanya aktor eksternal, yang berasal dari masyarakat untuk masyarakat, yang dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dengan harapan mereka mampu membawa pengetahuan yang cukup bagi masyarakat yang belum mengenal narkoba dan mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap masyarakat yang mempunyai keberagaman suku, kultur, agama, dan strata pendidikan. Selain itu, peran aktor eksternal menjadi sukarelawan yang mau dan mampu dalam melaksanakan strategi dalam mencegah masyarakat menyalahgunakan narkoba meskipun tidak ada imbalan yang diterima secara berkala terhadap usaha mereka.

Lain halnya dengan Bidang Pemberantasan yang memiliki aktor eksternal yang berasal dari Kepolisian Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan masyarakat. Pada bidang ini aktor eksternal memiliki peran yang berbeda dengan kedua bidang sebelumnya.

Aktor eksternal yang bekerja sama pada bidang ini memiliki peran untuk membantu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur ketika membutuhkan personil dalam hal penangkapan atau penyelidikan atau bahkan penggerebekan suatu tempat yang dicurigai digunakan untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba. Masyarakat sendiri memiliki peran yang amat sangat penting yaitu sebagai pelapor ketika di lingkungannya terdapat hal-hal yang mencurigakan terkait dengan penyalahgunaan atau peredaran narkoba.

### **2. Pelaksanaan strategi**

Pelaksana strategi berhubungan dengan aktivitas dan hal-hal yang dapat mempengaruhi sebuah strategi sehingga strategi tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, efektif dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi sebagai berikut:

#### **a. Program**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terkait program ini, menghasilkan suatu informasi dimana program yang dicanangkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program yang begitu serius untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam mencegah dan memberantas narkoba, misalnya seperti kegiatan Aksi Sekolah Bersih Narkoba. Program tersebut benar-benar dilakukan dengan serius oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur karena hingga saat ini telah dalam proses perwujudannya saja oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota.

Adapun target yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur sudah sangat baik, terlebih ditambah oleh target dari pusat yaitu 10.000 rehabilitasi yang menjadi PR (pekerjaan rumah) untuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Target ini menjadikan sebuah motivasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatannya semakin lebih keras lagi karena tak mudah memang untuk merehabilitasi pecandu dan tersangka untuk di rehabilitasi. Jika dilihat pada target tahun sebelumnya dimana capaian kinerja melebihi target, pada tahun ini pun Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat melakukan hal yang sama yaitu mencapai bahkan melebihi target yang telah ditentukan.

Dalam hal kendala pelaksanaan strategi, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur terganjal pada jumlah SDM, anggaran dan kendala yang tidak dapat diprediksi pada



saat pelaksanaan kegiatan di lapangan. Meskipun telah dibantu oleh pihak eksternal organisasi dalam pelaksanaan strategi, akan tetapi tetap dirasa kurang dalam jumlah staf yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Kendala di lapangan dapat diatasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur berusaha untuk responsif dan meningkatkan sensitivitas agar dapat beradaptasi dengan lingkungan yang sedang dihadapi

#### **b. Anggaran**

Anggaran untuk kegiatan DIPA (kegiatan yang telah direncanakan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur) sudah dianggarkan, yang tidak dianggarkan ialah kegiatan Non DIPA. Dengan begitu, banyaknya kegiatan diluar dan luasnya jangkauan yaitu seluruh Jawa Timur, untuk instansi ini melakukan kegiatan DIPA, menyebabkan kurang optimalnya dana anggaran dari APBN. Namun, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mempunyai cara dengan mengoptimalkan pelaksanaan strategi oleh pihak luar seperti komunitas atau LSM sehingga penyampaian informasi tetap berjalan dengan baik dengan tanpa melepaskan pengawasan dan koordinasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.

#### **c. Prosedur**

Prosedur di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur terdapat pada *Standard Operating Procedure*. Disanalah berisikan program dan kegiatan dengan proses yang harus dilalui untuk mencapai pelaksanaan kegiatan. Sayangnya, pada poin ini *Standard Operating Procedure* di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur masih belum diterbitkan Standar Operasional Prosedur pada tahun 2015, sehingga pelaksanaan kegiatan masih berpacu pada Standar Operasional Prosedur tahun 2014. Terlepas dari hal ini, pelaksanaan kegiatan berdasarkan Standar Operasional Prosedur pada tahun 2014 tersebut dirasa sudah efektif karena setiap orang telah memahami proses yang ada dalam Standar Operasional Prosedur. Kemudahan proses dalam pelaksanaan kegiatan menyebabkan hal ini dapat dilakukan dengan baik oleh staf.

### **3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia**

#### **a. Pengorganisasian (*Organizing*)**

Struktur dalam Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang Kepala, kemudian Kepala Bagian Tata Usaha,

lalu 3 bidang lainnya yaitu Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Pemberantasan. Pada struktur organisasi ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur nampak bahwa memiliki tipe struktur fungsional dimana struktur ini mengelompokkan tugas dan aktivitas berdasarkan fungsinya. Setiap bagian dan bidang yang ada pada struktur menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

#### **b. Penataan staf (*Staffing*)**

Penataan staf berkaitan dengan bagaimana organisasi mengelola stafnya dengan menempatkan sesuai dengan kemampuan, kompetensi, dan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Hal ini bertujuan dengan maksud agar pekerjaan yang dilakukan oleh staf sesuai dan *linear* dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga ia mempunyai pemahaman terkait pekerjaannya. Jika tidak sesuai, maka apa yang harus dilakukan dalam tugas dan fungsinya tak akan dapat dilaksanakan dengan cukup baik dan optimal. *Staffing* yang ada pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur terlihat sudah baik dan efektif dikarenakan penempatan staf sudah sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Terkait pada jumlah staf yang ada pada setiap bidang pun dapat mempengaruhi pelaksanaan strategi. Bidang Pencegahan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki 7 staf, sedangkan Bidang Pemberantasan memiliki 28 staf termasuk Kepala Bidang. Jumlah ini dirasa tidak cukup apabila dilihat dari jangkauan wilayah dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur ini. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan di wilayah Provinsi Jawa Timur yang memiliki 38 Kabupaten dan Kota dengan bantuan BNNKab/Kota.

#### **c. Pengarahan**

Pengarahan merupakan bentuk komunikasi dimana bertujuan untuk memberikan pemahaman akan sesuatu hal. Seperti halnya pengarahan yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur setiap Hari Senin pagi yang dinamakan anev (analisa dan evaluasi). Anev yaitu salah satu cara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur untuk melaporkan kegiatan setiap bidang selama satu minggu. Pengarahan ini juga merumuskan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada minggu selanjutnya, dan

menganalisa kekurangan-kekurangan yang terjadi pada kegiatan minggu sebelumnya.

Pengarahan yang lain dilakukan oleh Kepala Bidang masing-masing yang biasanya dilakukan tidak sesering yang dilakukan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dikarenakan pada anev, setiap orang sudah dapat memahami kegiatan dari masing-masing bidang dan pemikiran setiap staf karena rapat tersebut bersifat terbuka. Pengarahan oleh Kabid dilakukan hanya setahun sekali yang biasanya dilakukan pada awal tahun. Aktor eksternal pun ikut diberikan pengarahan terkait pelaksanaan kegiatan yang akan mereka lakukan. Pengarahan dilaksanakan oleh Kepala Bidang atau Kepala Seksi yang bersangkutan. Pengarahan berisi mengenai rencana kegiatan yang akan mereka lakukan, dimana tempatnya, dan kapan. Namun, pengarahan ini tidak hanya dilakukan secara tatap muka di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur akan tetapi juga dapat dilakukan melalui *chat messenger*, seperti *bbm group*, *whatsapp*, dan *email*. Memanfaatkan teknologi pada perkembangan jaman modern ini merupakan pilihan yang tepat dikarenakan menghemat biaya dan waktu meskipun tindak mengurangi informasi sedikitpun.

## V. PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Aktor internal pelaksana dan aktor eksternal pelaksana sama-sama memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan strategi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Aktor internal pelaksana strategi bertanggung jawab pada tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, serta mengajak pihak luar organisasi untuk bersama-sama melaksanakan pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan pemberantasan narkoba. Aktor eksternal pelaksana strategi pun memiliki peran penting dalam membantu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur sebagai perpanjangan tangan dalam menyebarluaskan informasi kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Dengan ini, informasi mengenai bahaya narkoba tak hanya dapat disebarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur saja akan tetapi pihak luar juga mampu melakukannya.

Meskipun tak ada imbalan berupa uang yang diterima oleh pihak luar bergabung dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, namun ini tak menjadi masalah bagi mereka karena kepedulian terhadap isu yang sedang berkembang di masyarakat menjadi salah satu

ketertarikan yang lebih baik dibanding imbalan. Namun, tidak kecil kemungkinan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur terkadang memberikan bantuan yang secukupnya ketika ada rencana aksi yang akan dilakukan.

Program yang telah direncanakan sudah cukup baik untuk mencapai sasaran dan target dalam program tersebut. Pelaksanaan program demin mencapai target telah dibuktikan pada capaian target pada tahun 2014, diharapkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dapat melakukannya lagi pada tahun ini. Meskipun kendala di lapangan sangat sulit untuk di prediksi namun inilah yang menjadi tantangan bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Kendala lainnya ada pada sumber daya manusia dan anggaran, dimana keduanya sama-sama terbatas. Namun, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur memiliki cara untuk mengatasinya yakni dengan mendorong aktor eksternal organisasi melakukan rencana aksi dengan pengawasan dan koordinasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Ditambah dengan saling membantu pekerjaan staf lainnya jika ada yang membutuhkan bantuan.

Anggaran pun dirasa kurang pada kegiatan DIPA (kegiatan yang telah disusun oleh BNNP Jawa Timur) dalam karena faktor jangkauan wilayah kegiatan, dan jumlah kegiatan yang beragam. Berbeda dengan kegiatan Non DIPA karena BNNP Jawa Timur biasanya hanya diminta untuk datang dan sebagai pemateri sehingga tidak mengeluarkan anggaran. Prosedur juga agaknya menjadi kendala bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, karena pada tahun 2015 Standar Operasional Prosedur belum terwujud dalam bentuk nyata. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur masih berpedoman pada Standar Operasional Prosedur tahun 2014. Namun, pelaksanaan kegiatan tak terhambat, hal ini dikarenakan tidak jauh berbeda dengan Standar Operasional Prosedur pada tahun kemarin.

Struktur yang dibentuk pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur merupakan tipe struktur fungsional dimana tipe ini dibagi berdasarkan fungsinya. Struktur ini sudah efektif karena setiap orang melaksanakan tugas dengan baik sesuai tupoksi masing-masing. *Staffing* juga sudah terlihat baik dikarenakan penempatan pegawai sudah sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dilihat dari latar belakang pendidikannya. Terkait pengarahan pun sudah sangat baik, hal ini dapat ditunjukkan dari pengarahan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur kepada stafnya yang dilakukan setiap Hari Senin pagi

untuk mengetahui laporan masing-masing bidang dalam melaksanakan kegiatannya selama satu minggu, dan adanya evaluasi agar melakukan perbaikan untuk ke depannya.

Pengarahan lainnya untuk pihak luar juga sudah baik, karena adanya cara yang mudah untuk melakukan pengarahan, entah secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui *online messenger (bbm group, whatsapp, ataupun email)* sehingga pengarahan dan koordinasi tetap dapat dilakukan dengan baik tanpa mengurangi pesan.

## B. SARAN

Melihat dari pembahasan diatas, dapat ditentukan faktor yang menjadi kelemahan dari Implementasi Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai masukan:

1. Penambahan sumber daya manusia agar lebih memudahkan staf Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai targetnya.
2. Pengoptimalan implementasi strategi diharapkan dapat didukung oleh anggaran APBN yang dirasa selama ini belum maksimal.
3. Mewujudkan Standar Operasional Prosedur tahun ini agar kinerja lebih mudah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amriel, Reza Indagiri. 2008. *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*. Jakarta: Salemba
- Andrews, Kenneth R. (2005). *The concept of corporate strategy*. New York: oxford university press.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badan Narkotika Nasional. *Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba 2013*, edisi 2014, (online). ([http://103.3.70.3/portal/uploads/post/2014/08/19/Jurnal\\_Data\\_P4GN\\_2013\\_Edisi\\_2014\\_Oke.pdf](http://103.3.70.3/portal/uploads/post/2014/08/19/Jurnal_Data_P4GN_2013_Edisi_2014_Oke.pdf), diakses pada tanggal 14 11 2014)
- Berita Jatim. 26 Agustus 2014. “*BNNP Jatim Sosialisasi Bahaya Narkoba Di Universitas Hang Tuah*”. (koran online). ([http://m.beritajatim.com/hukum\\_kriminal/216126/bnnp\\_jatim\\_sosialisasi\\_bahaya\\_narkoba\\_di\\_universitas\\_hang\\_tuah.html#.VGt6HUBp2KE](http://m.beritajatim.com/hukum_kriminal/216126/bnnp_jatim_sosialisasi_bahaya_narkoba_di_universitas_hang_tuah.html#.VGt6HUBp2KE), diakses pada tanggal 18 November 2014)
- Berita Tempo. 30 Agustus 2013. “*Kerugian Negara Akibat Narkoba Capai Rp 48 Triliun*”. (koran online). (<http://www.tempo.co/read/news/2013/08/30/078508685/Kerugian-Negara-Akibat-Narkoba-Capai-Rp-48-Triliun>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2014)
- Blog BNNP Jatim. “*Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur*”. (online). (<http://bnnpjatim.blogspot.com/profil>, diakses pada tanggal 17 November 2014)
- Blog BNNP Jatim. “*Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur*”. (online). (<http://bnnpjawatimur.blogspot.com/p/kedudukan-tugas-pokok-dan-fungsi-bnnp.html#>, diakses pada tanggal 17 November 2014)
- David, Fred R. 2004. *Mnajemenen Strategis: Konsep-Konsep* (terjemahan). Jakarta: Indeks
- Dirgantoro, Crown. 2004. *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT. Grasindo
- Detik News. 23 Mei 2013. “*10 Ribu Pelajar Di Jatim Deklarasi Anti Narkkoba*” (koran online). (<http://news.detik.com/read/2013/05/23/151746/2254106/466/10-ribu-pelajar-di-jatim-deklarasi-anti-narkoba>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2014)
- Detik News. 14 Oktober 2014. “*Bentengi Siswa Dari Pengaruh Narkoba BNNP Jatim Mau Sekolah*” (koran online). (<http://news.detik.com/surabaya/read/2014/08/14/151229/2662167/475/bentengi-siswa-dari-pengaruh-narkoba-bnnp-jatim-masuk-sekolah?nd771104bcj>, diakses pada tanggal 17 November 2014)
- Fanani, Faiz. 2013. *Manajemen Strategi Pengelolaan Ketertiban Pedagang Di Pasar Tradisional Jagir Surabaya*.
- Suyanto, M. 2007. *Strategic Management (Global Most Admired Companies)*. Yogyakarta: ANDI Publisher
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara: Jakarta.
- Handoko, T. Hani, 2003, *Manajemen*, Edisi Kedua. BPFE: Yogyakarta.
- Hariadi, Bambang. 2005. *Strategi Manajemen*. Malang: Bayumedia Publishing
- Heene, Aimee, dkk. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung : Refika Aditama
- Laporan Magang. 2014. *Implementasi Intruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan kebijakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011 – 2015*.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan (Dengan Ilustrasi Di Bidang Pendidikan)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Wesley Publishig Company, Inc
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- Radja Warta. 3 Oktober 2014. “*BNN Bahaya Narkoba Hatus Masuk Kurikulum Pendidikan*”. (online). (<http://radjawarta.co/index.php/metro/item/2566->

- bnn-bahaya-narkoba-harus-masuk-kurikulum-  
pendidikan, diakses pada tanggal 17 November 2014)
- Nugroho, Riant. 2003. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 04 Tahun 2010
- Setiawan, Dedi. 2014. *Manajemen Strategi Penertiban Sistem Tera Dan Tera Ulang Pmpa Ukuran Bahan Bakar Minyak Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (Studi Pada Bidang Metrologi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Prov Jatim)*.
- Siagian, Sondang P. 1933. *Analisis Serta Perumusan Kebijakan Dan Strategi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P. 2004. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Situs website Informasi dan Edukasi Narkoba. Februari 2014. “*Pengertian Narkoba*” (online) (<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/10/929/pengertian-narkoba>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2014)
- Situs website Gerakan Anti Narkoba. 5 Agustus 2014. “*Penyalahgunaan Ganja Mereduksi Esensi Manusia*” (<http://granat.or.id/en/reports/579>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2014)
- Tribun News. 6 Februari 2014. “*Politisi Golkar Kritik Rencana Pembebasan Corby*” (koran online). (<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/06/politisi-golkar-kritik-rencana-pembebasan-corby>, diakses pada tanggal 17 November 2014)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Website Badan Narkotika Nasional DKI. “*Beberapa Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba*”(online). (<http://bnn-dki.com/index.php/aksi/berita-dari-kuningan/pemberdayaan-masyarakat/706-beberapa-upaya-pencegahan-dan-pemberantasan-penyalahgunaan-narkoba>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2014)
- Website Dinas Kesehatan Bali. 1 Juli 2014. “*Narkoba*” (online). (<http://www.diskes.baliprov.go.id/id/NARKOBA>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2014)
- Wheelen, Thomas dan Hunger, David. 1989. *Strategic Management And Public Policy*. USA: Addison
- Wheelen, Thomas dan Hunger, David. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: ANDI Publisher.